



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53115
Telepon (0281) 636004, 636005, 636079, Faksimile (0281) 635332
Laman <http://setda.banyumaskab.go.id>, Pos-el setda@banyumaskab.go.id

Purwokerto, **11 Februari 2026**

Nomor : **400.7/XX/2026**
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. Terlampir
Di
Tempat

Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dan selesainya masa bakti Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum Banyumas Sehat maka perlu dilakukan pembentukan kembali kelembagaan kabupaten kota sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran Saudara pada pertemuan yang diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 13 Februari 2026

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 11.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Tengah BAPPERIDA Kabupaten Banyumas

Acara : Review Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat 2025 dan
Penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim KKS 2026-2030.

Keterangan : Masing-masing OPD untuk mengusulkan nama bidang dan fungsional
pengampu indikator pada tatanan kabupaten kota sehat sesuai
lampiran III.

Demikian untuk menjadi periksa atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyumas
Asisten Pemerintahan dan Kesra



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 196709231987021001

Tembusan:

1. Bupati Banyumas ;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas

Lampiran I
Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 400.7/XX/2026
Tanggal : 11 Februari 2026
Hal : Undangan

Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
4. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
11. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas
17. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
18. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto
19. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto

a.n. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyumas
Asisten Pemerintahan dan Kesra



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 196709231987021001

Lampiran II
Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 400.7/XX/2026
Tanggal : 11 Februari 2026
Hal : Undangan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI TIM KABUPATEN KOTA SEHAT
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

I. Latar Belakang

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan pendekatan pembangunan daerah yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk mewujudkan kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni melalui penyelenggaraan berbagai tatanan. Keberhasilan penyelenggaraan KKS memerlukan dukungan koordinasi lintas sektor yang efektif melalui peran aktif Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum.

Pelaksanaan KKS Tahun 2025 telah berjalan melalui berbagai kegiatan pada masing-masing tatanan, sehingga diperlukan evaluasi dan koordinasi guna meninjau capaian, kendala, serta perbaikan strategi pelaksanaan kedepan. Selain itu masa bhakti kepengurusan Tim KKS berakhir pada bulan Juli 2026 sehingga perlu dilakukan penyusunan dan pembaharuan Surat Keputusan (SK) tim untuk menjamin keberlanjutan program.

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005.

III. Tujuan

1. Tujuan Umum
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat yang berkelanjutan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Melakukan review pelaksanaan program dan kegiatan KKS Tahun 2025
 - b. Mengidentifikasi capaian, kendala, dan peluang perbaikan
 - c. Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan KKS tahun berikutnya
 - d. Menyepakati struktur dan keanggotaan Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

IV. Sasaran

1. Tim Pembina KKS Kabupaten
2. Tim Teknis KKS Kabupaten
3. Perangkat Daerah/OPD terkait tatanan KKS
4. Forum Kabupaten Sehat
5. Stakeholder/mitra terkait

V. Hasil yang Diharapkan

1. Tersusunnya laporan review pelaksanaan KKS Tahun 2025
2. Teridentifikasinya permasalahan dan solusi perbaikan
3. Tersusunnya rencana tindak lanjut (RTL) pelaksanaan KKS
4. Draft pembaharuan SK Tim KKS

VI. Ruang Lingkup Kegiatan

- 1. Paparan pelaksanaan KKS Tahun 2025
- 2. Evaluasi capaian indikator masing-masing tatanan
- 3. Diskusi dan identifikasi permasalahan
- 4. Penyusunan rekomendasi perbaikan
- 5. Pembahasan struktur organisasi dan keanggotaan tim
- 6. Penyusunan draft SK pembaharuan tim

- VII. Metode Pelaksanaan
- 1. Pertemuan koordinasi tatap muka
 - 2. Presentasi
 - 3. Diskusi
 - 4. Pleno penyepakatan

- VIII. Waktu dan Tempat
- Hari/Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
- Waktu : pukul 08.30 s.d 11.30 WIB
- Tempat : Aula Sambiloto Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas

IX. Susunan Acara

Waktu	Acara	Pelaksana
08.30 – 09.00	Registrasi peserta	Dinkes
09.00 – 09.30	Pembukaan	
09.30 – 10.00	Review KKS 2025	Ketua Tim Pembina KKS
10.00 – 10.30	Diskusi dan evaluasi tatanan	
10.30 – 11.00	Pembahasan pembaharuan SK Tim KKS	Bapperida/Kesra Setda
11.00 – 11.30	Penyusunan RTL	
11.30	Penutup	

- X. Pembiayaan
- Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2026.

- XI. Penutup
- Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman pertemuan koordinasi Tim Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Banyumas. Diharapkan melalui kegiatan ini, penyelenggaraan KKS dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.

a.n. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyumas
Asisten Pemerintahan dan Kesra



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 196709231987021001

Lampiran III
Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 400.7/XX/2026
Tanggal : 11 Februari 2026
Hal : Undangan

Indikator Tatanan kabupaten Kota Sehat

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
I	Sehat Mandiri	1	Jumlah Kematian Ibu	DINKES KB
		2	Jumlah Kematian Neonatus	DINKES KB
		3	Angka Harapan Hidup	BAPPERIDA
		4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terdekat	DINKES KB
		5	Akses terhadap informasi kesehatan	DINKES KB
		6	Prevalensi Stunting pada Balita	DINKES KB
		7	Cakupan penemuan kasus TBC	DINKES KB
		8	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES KB
		9	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	DINKES KB
		10	Angka kesakitan Dengue	DINKES KB
		11	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
		12	Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	DINKES KB
		13	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES KB
		14	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES KB
		15	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan adanya program penanggulangan pemasungan/ bebas pasung	DINKES KB
		16	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Lengkap	DINKES KB
		17	Pesentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM	DINKES KB
		18	Kabupaten/Kota yang telah	DINKES KB

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			eliminasi malaria	
		19	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	DINKES KB
		20	Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayani	DINKES KB
		21	Persentase ibu hamil KEK	DINKES KB
		22	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia >18 tahun	DINKES KB
		23	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas telah mengelola limbah medis sesuai standar	DINKES KB
		24	Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza	DINKES KB
		25	Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang memiliki risiko kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining	DINKES KB
		26	Persentase posyandu aktif di Kabupaten/Kota	DINKES KB
		27	Adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menerapkan indikator prinsip 100% kepatuhan KTR	DINKES KB
		28	Persentase Puskesmas yang melakukan surveilans vektor (Angka Bebas Jentik, Indeks Habitat Vektor Malaria atau Filariasis dan Success trap tikus)	DINKES KB
		29	Persentase Puskesmas minimal yang melaksanakan pelayanan ramah anak (PRAP)	DINKES KB
II	Permukiman dan Fasilitas Umum	1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DLH
		2	Jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi aman	DPU
		3	Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah	DLH
		4	Luas kawasan permukiman kumuh dalam kewenangan pemerintah kota/kabupaten yang tertangani (luasan di bawah 10 hektar)	DINPERKIM
		5	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPU
		6	Persentase Tempat Fasilitas	DINKES KB

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			Umum (TFU) yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	
		7	Adanya implementasi program langit biru	DLH
		8	Pelaksanaan car free day	DLH & DISHUB
		9	Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Program Kali Bersih (PROKASIH)	DPU/DLH
		10	Adanya Penyelenggara SPAM (BUMD/ UPTD/ BUMDES/ POKMAS/ BUKS/ Swasta) dan memiliki dokumen RISPAM	DPU
		11	Adanya regulasi terkait Air Limbah Domestik (ALD) dan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan ALD (Strategi Sanitasi Perkotaan dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan ALD)	DPU
		12	Adanya pemisahan peran Operator dan Regulator dalam kelembagaan pengelola persampahan	DLH
		13	Terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dengan layanan penyedotan lumpur tinja serta truk tinja yang beroperasi	DPU
		14	Terdapat instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) serta tersambung ke rumah tangga	DPU
		15	Adanya regulasi/kebijakan terkait persampahan (Perda atau Perkada) dan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah)	DLH
		16	Adanya pelaksanaan pemilahan sampah oleh kelompok masyarakat dan program pengelolaan sampah tingkat desa yang meliputi pemrosesan awal di tingkat rumah tangga sebelum diangkut ke TPS, adanya upaya pengolahan sampah organik menjadi kompos, memfungsikan TPS menjadi tempat daur ulang sampah rumah tangga, dan pengangkutan sampah dari	DLH

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			TPS ke TPA secara rutin	
		17	Persentase infrastruktur pengolahan sampah berbasis masyarakat (TPS 3R dan/atau bank sampah) terbangun serta sarana pengangkutan sampah sesuai standar dan beroperasi	DLH
		18	Persentase korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	DAMKAR/ SATPOL PP
		19	Keberadaan fasilitas dan sarana di kawasan pertamanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difable	DLH
		20	Implementasi ketersediaan/akses tempat pengumpulan limbah B3 yang memenuhi syarat di tingkat Kabupaten/Kota	DLH
		21	Akses rumah tangga yang memenuhi kriteria rumah layak huni	DINPERKIM
		22	Persentase penduduk yang memiliki akses listrik (rasio elektrifikasi)	BAPPERIDA
III	Pendidikan	1	Keberadaan regulasi daerah tentang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)	DINDIK
		2	Keberadaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD)	DINDIK
		3	Persentase Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak	DINDIK
		4	Persentase sekolah/madrasah yang mencapai stratifikasi standar Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) atau yang mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat secara berkelanjutan	DINDIK
		5	Persentase Sekolah/Madrasah yang telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	DINKES KB
		6	Keberadaan Tim Pembina UKS/M tingkat	DINDIK

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan	
		7	Presentase Sekolah/Madrasah yang memiliki tim pelaksana UKS/M dibuktikan dengan SK	DINDIK
		8	Persentase sekolah/madrasah yang melakukan pengawasan internal	DINDIK
		9	Persentase sekolah/madrasah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	DINDIK/DLH
		10	Persentase sekolah/madrasah yang menyelenggarakan skrining kesehatan	DINDIK/DINKES KB
		11	Persentase anak usia sekolah dasar dan sederajat yang mendapatkan Imunisasi Sekolah Lengkap (ISL)	DINDIK/DINKES KB
IV	Pasar	1	Adanya regulasi daerah tentang pasar sehat	DKUKMP
		2	Adanya regulasi penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL)	DKUKMP
		3	Persentase pasar yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	DKUKMP
		4	Persentase pasar yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	DKUKMP
		5	Persentase Pasar menyediakan akses air bersih/air minum yang memenuhi persyaratan	DKUKMP
		6	Persentase pasar melakukan pengawasan internal terkait kesehatan (contoh : pengawasan bahan pangan berbahaya atau uji kelayakan air bersih)	DKUKMP
		7	Persentase pasar melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan masyarakat bekerja sama dengan sektor terkait kepada masyarakat pasar	DKUKMP
		8	Persentase pasar memiliki fasilitas ruang ASI	DKUKMP
		9	Persentase pasar melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, dan recyle)	DKUKMP
		10	Persentase pasar melakukan pengelolaan limbah cair	DKUKMP
		11	Persentase pasar memiliki	DKUKMP

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			fasilitas toilet yang bersih dan memadai	
		12	Persentase pasar memiliki fasilitas pos kesehatan (ruang kesehatan atau fasilitas P3K)	DKUKMP
		13	Persentase pasar terdapat pemotongan hewan di dalam pasar	DKUKMP
V	Perkantoran & Perindustrian	1	Persentase industri kecil dan menengah (IKM) memenuhi kewajiban perizinan berusaha pada sektor perindustrian	DKUKMP/ PERINDUSTRIAN
		2	Persentase tempat kerja/ perusahaan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	DKUKMP/ PERINDUSTRIAN
		3	Jumlah tempat kerja atau perusahaan memiliki Unit Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	DINKES KB
		4	Persentase tempat kerja memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala (deteksi dini) pada pegawainya minimal 1 tahun sekali	DKUKMP/ PERINDUSTRIAN
		5	Angka kecelakaan kerja di tempat kerja setahun terakhir	DKUKMP/ PERINDUSTRIAN/ BPJS KESEHATAN/ KETENAGAKERJAAN
		6	Jumlah perusahaan mendapatkan penghargaan dibidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah	DKUKMP/ PERINDUSTRIAN
		7	Persentase jumlah puskesmas membina Pos UKK	DINKES KB
		8	Jumlah perusahaan menerapkan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	DINKES KB
		9	Jumlah kasus pencemaran lingkungan akibat industri dalam setahun terakhir	DLH
		10	Persentase perusahaan menyampaikan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) secara berkala 6 bulan sekali	DLH
		11	Persentase usaha mikro sektor makanan, minuman, industri pengolahan yang	DKUKMP/ DINKES KB

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			memiliki Sertifikat PIRT, MD BPOM/ Izin Edar	
VI	Pariwisata	1	Keberadaan regulasi daerah tentang Pariwisata Sehat	DINPORABUDPAR
		2	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstra/RKPD)	DINPORABUDPAR
		3	Persentase sarana akomodasi yang memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	DINKES KB
		4	Persentase Daya Tarik Wisata yang memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	DINKES KB
		5	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Siap Saji yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)	DINKES KB
		6	Keberadaan Daya Tarik Wisata (DTW) yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat	DINPORABUDPAR
		7	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang menerapkan pariwisata inklusif	DINPORABUDPAR
		8	Daya Tarik Wisata (DTW) menyediakan asuransi keselamatan bagi wisatawan	DINPORABUDPAR
		9	Tersedianya Daya Tarik Wisata (DTW) yang kondusif	DINPORABUDPAR
		10	Kabupaten/Kota memiliki Desa/Kampung Wisata	DINPORABUDPAR
		11	Terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap Desa/Kampung Wisata	DINPORABUDPAR
		12	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang memiliki upaya pengelolaan sampah secara mandiri	DINPORABUDPAR
VII	Transportasi dan Lalu lintas	1	Adanya regulasi terkait penyediaan layanan transportasi jalan, kawasan tertib lalu lintas, sistem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	DISHUB
		2	Persentase kendaraan umum yang laik jalan, minimal $\geq 80\%$	DISHUB
		3	Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dalam tahun berjalan $\leq 65\%$	DISHUB
		4	Adanya sistem layanan	DISHUB

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			pertolongan kecelakaan yang cepat dan terintegrasi kesiapsiagaan dalam penanganan korban kecelakaan	
		5	Adanya program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi	DISHUB
		6	Terminal yang memenuhi syarat kesehatan	DISHUB
		7	Persentase angkutan umum yang memiliki BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	DISHUB
		8	Keberadaan fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas	DISHUB
		9	Jumlah titik fasilitas lajur sepeda	DISHUB
		10	Adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	DISHUB
		11	Pengawasan dan penindakan terhadap emisi gas buang kendaraan	DISHUB
VIII	Perlindungan Sosial	1	Adanya peraturan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah	DINSOSPERMASDES
		2	Monitoring dan evaluasi program jaminan perlindungan sosial yang dilakukan daerah	DINSOSPERMASDES
		3	Angka Kriminalitas	DINSOSPERMASDES
		4	Persentase pelayanan komprehensif yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan	DINSOSPERMASDES
		5	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	DINSOSPERMASDES
		6	Adanya layanan pengaduan terkait permasalahan sosial	DINSOSPERMASDES
		7	Adanya kebijakan/program peningkatan kesejahteraan sosial dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah/RPJMD	DINSOSPERMASDES
		8	Keberadaan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memberikan penanganan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan	DINSOSPERMASDES

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
			sosial (PPKS) yang berbadan hukum/ terdaftar di dinas sosial	
		9	Adanya regulasi daerah tentang penanganan kekerasan anak, perempuan dan Lansia	DINSOSPERMASDES
		10	Adanya penyelenggaraan penanganan kekerasan anak, perempuan dan lansia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD	DINSOSPERMASDES
		11	Adanya upaya pencegahan untuk menurunkan angka perkawinan pada usia anak	DINSOSPERMASDES
		12	Adanya penggiat penanganan kekerasan terhadap anak, perempuan, dan Lansia baik secara individu/kelompok	DINSOSPERMASDES
		13	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	DINSOSPERMASDES
IX	Penanggulangan Bencana	1	Adanya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disahkan oleh Kepala Daerah	BPBD
		2	Adanya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah	BPBD
		3	Adanya dokumen rencana kontingensi daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah	BPBD
		4	Adanya kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di daerah	BPBD
		5	Adanya integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra PD/ Renja PD)	BPBD
		6	Adanya sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik sesuai potensi ancaman bencana wilayahnya (EWS longsor, EWS banjir, EWS tsunami, SKDR, EWS Karlahut, EWS Bencana Nuklir, Biologi, Kimia, dll)	BPBD/DINKES KB
		7	Adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan SK Kepala BPBD	BPBD/DINKES KB

NO	TATANAN		INDIKATOR	OPD PENGAMPU
		8	Adanya Tim Koordinasi Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah dengan SK Bupati/ Walikota	BPBD/DINKES KB
		9	Adanya persediaan logistik untuk kebutuhan dasar yang mencukupi di masing-masing Kabupaten/Kota dalam kesiapsiagaan bencana	BPBD
		10	Persentase wilayah tangguh bencana (Destana/Kampung Siaga Bencana) yang aktif melakukan upaya pengelolaan risiko bencana di daerah rawan bencana	BPBD
		11	Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kawasan Rawan Bencana (KRB)	BPBD
		12	Adanya kerja sama antar daerah yang berbatasan secara langsung, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam upaya penanggulangan bencana	BPBD
		13	Kabupaten/Kota yang melaksanakan respon terhadap sinyal SKDR kurang dari 24 jam	BPBD/DINKES KB
		14	Kabupaten/Kota memiliki dokumen Rencana Kontingensi penyakit potensi wabah	DINKES KB

a.n. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyumas
Asisten Pemerintahan dan Kesra



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 196709231987021001